

**PERAN MAHASISWA SEBAGAI KONTROL SOSIAL: STUDI AKSI
DEMONSTRASI MENOLAK TUNJANGAN DPR TAHUN 2025**

OLEH:

ANESHA AQILA DEALOVA

2416041098

TUGAS METODE PENELITIAN ADMINISTRASI PUBLIK

Jurusan Ilmu Administrasi Negara

Fakultas ISIP Universitas Lampung



Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik

Universitas Lampung

Bandar Lampung

31 Agustus 2025

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1.Latar Belakang

Mahasiswa telah lama menjadi aktor penting dalam sejarah perjalanan demokrasi Indonesia. Peran mahasiswa sebagai kontrol sosial dalam sejarah Indonesia bukanlah fenomena baru, melainkan bagian integral dari perjalanan bangsa yang sarat dengan dinamika politik dan sosial. Sejak era 1960-an, mahasiswa telah menunjukkan kapasitasnya sebagai kekuatan moral dan intelektual yang mampu mengintervensi jalannya kekuasaan. Pada tahun 1966, gerakan mahasiswa yang menuntut Tritura (Tiga Tuntutan Rakyat) menjadi titik balik yang mengguncang fondasi pemerintahan Presiden Soekarno. Tuntutan tersebut mencerminkan keresahan publik terhadap kondisi politik dan ekonomi saat itu, dan mahasiswa tampil sebagai representasi suara rakyat yang menuntut perubahan. Gerakan ini bukan hanya berhasil memobilisasi masa, tetapi juga menunjukkan bahwa mahasiswa memiliki legitimasi sosial untuk mengawal arah kebijakan negara.

Dua dekade setelah Tritura, Indonesia kembali menyaksikan peran sentral mahasiswa dalam momen bersejarah: Reformasi 1998. Di tengah krisis moneter dan meningkatnya ketidakpuasan terhadap rezim Orde Baru yang otoriter dan korup, mahasiswa dari berbagai universitas turun ke jalan, menyuarakan aspirasi rakyat yang selama ini dibungkam. Demonstrasi besar-besaran yang berlangsung di berbagai kota, terutama di Jakarta, menjadi simbol perlawanan terhadap kekuasaan yang tidak lagi berpihak pada kepentingan publik. Keberanian mahasiswa menduduki gedung DPR/MPR dan menuntut pengunduran diri Presiden Soeharto menunjukkan bahwa mereka bukan hanya pengamat, tetapi pelaku aktif dalam proses demokratisasi. Reformasi 1998 pun menjadi tonggak sejarah yang menandai transisi Indonesia menuju sistem politik yang lebih terbuka dan partisipatif.

Setelah era Reformasi, meskipun ruang demokrasi terbuka lebih lebar, tantangan terhadap keadilan sosial dan transparansi pemerintahan tetap ada. Dalam konteks ini, mahasiswa terus memainkan peran penting sebagai kontrol sosial yang mengingatkan pemerintah akan komitmennya terhadap rakyat. Mereka tidak segan menolak kebijakan yang dianggap

merugikan masyarakat, seperti kenaikan harga BBM, pelemahan KPK, pengesahan Undang-Undang Omnibus Law, hingga revisi RKUHP yang dinilai mengancam kebebasan sipil. Aksi-aksi mahasiswa pasca-Reformasi menunjukkan bahwa mereka bukan sekadar pelaku demonstrasi yang bersifat reaktif, melainkan aktor strategis dalam menjaga kualitas demokrasi. Mereka menjadi penghubung antara aspirasi rakyat dan kebijakan negara, serta berperan sebagai katalis dalam proses konsolidasi demokrasi yang berkelanjutan.

Dalam ranah administrasi publik, kontrol sosial dapat dipahami sebagai serangkaian mekanisme yang dijalankan oleh masyarakat untuk menjaga agar kekuasaan yang dimiliki oleh pemerintah tidak digunakan secara sewenang-wenang. Mekanisme ini bertujuan untuk memastikan bahwa pemerintah tetap bertanggung jawab atas tindakan dan kebijakan yang diambil, serta senantiasa bekerja sesuai dengan mandat dan kepentingan rakyat. Konsep ini menekankan pentingnya keterlibatan publik dalam proses pengawasan terhadap jalannya pemerintahan, sehingga tercipta sistem yang transparan dan berorientasi pada kepentingan umum. Kontrol sosial bukan hanya bersifat reaktif terhadap penyimpangan, tetapi juga proaktif dalam mendorong tata kelola yang baik (Etzioni, 1975).

Dalam konteks masyarakat sipil, mahasiswa menempati posisi yang cukup strategis karena memiliki kapasitas intelektual dan daya kritis yang relatif lebih tinggi dibandingkan kelompok masyarakat lainnya. Dengan bekal pengetahuan, akses terhadap informasi, serta kemampuan analisis yang tajam, mahasiswa mampu mengidentifikasi kebijakan yang tidak berpihak pada rakyat dan mengorganisasi respons sosial terhadapnya. Ketika terjadi ketimpangan atau penyalahgunaan kekuasaan, mahasiswa sering kali menjadi motor penggerak dalam membentuk opini publik dan mendorong perubahan. Peran ini menjadikan mereka sebagai aktor penting dalam menjaga keseimbangan antara kekuasaan negara dan kepentingan masyarakat luas.

Keberadaan mahasiswa sebagai bagian dari masyarakat sipil berfungsi sebagai penyeimbang yang krusial, terutama ketika lembaga formal seperti parlemen, lembaga pengawas, atau media tidak mampu menjalankan fungsinya secara optimal. Dalam situasi seperti ini, mahasiswa dapat mengambil peran sebagai pengawas alternatif yang mengingatkan pemerintah akan tanggung jawabnya terhadap rakyat. Melalui aksi kolektif, kampanye advokasi, dan diskusi publik, mahasiswa berkontribusi dalam memperkuat demokrasi dan mendorong akuntabilitas. Dengan demikian, mereka tidak hanya menjadi

penerima kebijakan, tetapi juga aktor aktif dalam proses pembentukan dan evaluasi kebijakan publik.

Peran mahasiswa sebagai kekuatan moral (*moral force*) dan agen perubahan (*agent of change*) dalam kehidupan politik dan sosial Indonesia tidak muncul secara tiba-tiba atau tanpa dasar. Posisi strategis mereka sebagai kelompok intelektual muda yang berada di luar lingkaran kekuasaan politik praktis dan tidak terikat oleh kepentingan ekonomi yang mapan memberikan mereka ruang independensi yang luas. Kebebasan dari pengaruh vested interest ini menjadikan suara mahasiswa memiliki bobot moral yang tinggi di mata publik. Mereka dipandang sebagai representasi nurani masyarakat, yang mampu menyuarakan kebenaran dan keadilan tanpa dibebani oleh kalkulasi politik atau keuntungan material. Dalam banyak kasus, gerakan mahasiswa muncul sebagai respons terhadap situasi yang dianggap tidak adil, tidak transparan, atau merugikan kepentingan masyarakat luas. Mereka menjadi barometer sosial yang mampu menangkap kegelisahan publik dan menerjemahkannya ke dalam bentuk aksi kolektif.

Dalam kerangka teori gerakan sosial, kemunculan gerakan mahasiswa dapat dipahami sebagai reaksi terhadap apa yang disebut sebagai "kerangka ketidakadilan" (*injustice frame*) (Snow, Soule, & Kriesi, 2004). Artinya, gerakan ini lahir dari persepsi kolektif bahwa telah terjadi pelanggaran terhadap norma atau nilai yang dianggap fundamental oleh masyarakat. Mahasiswa, dalam hal ini, tidak hanya bertindak sebagai individu yang peduli, tetapi sebagai bagian dari komunitas yang memiliki kesadaran bersama akan perlunya perubahan. Mereka mengorganisasi diri, membangun narasi, dan melakukan mobilisasi untuk menantang struktur kekuasaan yang dianggap tidak lagi mewakili kepentingan rakyat.

Memasuki tahun 2025, Indonesia berada dalam fase yang penuh tantangan, baik dari segi sosial maupun politik. Memasuki era demokrasi kontemporer, peran mahasiswa tetap relevan dan bahkan semakin kompleks. Di tengah harapan akan kemajuan dan stabilitas, muncul berbagai persoalan yang menguji ketahanan institusi demokrasi dan kepercayaan publik terhadap para pemangku kebijakan. Salah satu isu yang paling mencolok adalah menurunnya tingkat kepercayaan masyarakat terhadap Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), lembaga yang seharusnya menjadi representasi suara rakyat dalam sistem pemerintahan. Berdasarkan survei yang dilakukan oleh Lembaga Indikator Politik Indonesia pada tahun

2024, hanya sekitar 38 persen masyarakat yang menyatakan masih percaya terhadap DPR. Angka ini menunjukkan penurunan signifikan dan menjadi indikator krisis legitimasi yang dialami oleh lembaga legislatif tersebut.

Penurunan kepercayaan ini bukanlah fenomena yang berdiri sendiri, melainkan hasil dari akumulasi berbagai peristiwa dan kebijakan yang dinilai tidak berpihak pada kepentingan rakyat. Kasus-kasus korupsi yang melibatkan sejumlah anggota DPR menjadi sorotan utama, memperkuat persepsi publik bahwa lembaga ini lebih mementingkan kepentingan pribadi dan kelompok daripada menjalankan amanat konstitusi. Selain itu, pengesahan undang-undang yang kontroversial dan minim partisipasi publik turut memperburuk citra DPR. Banyak kebijakan yang dianggap tidak transparan, tidak inklusif, dan bahkan merugikan kelompok masyarakat tertentu. Ketika rakyat berharap adanya perlindungan dan keadilan, keputusan politik yang diambil justru sering kali menimbulkan kekecewaan dan kemarahan.

Pada tahun ini, muncul sebuah kebijakan kontroversial yang menguji kembali posisi mahasiswa sebagai pengontrol sosial, yakni kebijakan mengenai pemberian tunjangan hunian kepada anggota DPR RI yang nilainya mencapai Rp3 juta per hari atau Rp 100 juta per bulan. Kebijakan ini memicu gelombang kritik dari berbagai lapisan masyarakat karena dianggap tidak mencerminkan terhadap kondisi ekonomi masyarakat. Di tengah situasi sosial yang penuh tantangan, seperti meningkatnya harga kebutuhan pokok, tingginya beban pajak daerah, serta terbatasnya akses terhadap lapangan pekerjaan yang layak, pemberian tunjangan besar kepada wakil rakyat dinilai sebagai bentuk ketidakadilan struktural yang mencolok. Kebijakan tersebut memperlihatkan adanya kesenjangan yang semakin lebar antara elite politik dan masyarakat umum, serta mencerminkan lemahnya orientasi kebijakan terhadap kesejahteraan rakyat. Kesenjangan antara aspirasi masyarakat dan tindakan para elit politik semakin memperlebar jurang ketidakpercayaan. Rakyat merasa bahwa suara mereka tidak lagi menjadi pertimbangan utama dalam proses pengambilan keputusan. Lembaga yang seharusnya menjadi wakil rakyat justru terlihat lebih sibuk mengurus kepentingan internal dan mempertahankan privilese. Dalam konteks ini, muncul pertanyaan besar mengenai efektivitas sistem representatif yang dijalankan selama ini. Apakah DPR masih mampu menjalankan fungsi pengawasan, legislasi, dan representasi secara optimal? atau lembaga ini telah kehilangan arah dan terjebak dalam pusaran kepentingan politik yang sempit?

Sebagai respons terhadap kebijakan tersebut, mahasiswa dari berbagai perguruan tinggi di Indonesia menggelar aksi demonstrasi yang tersebar di sejumlah kota besar, dengan Jakarta sebagai pusat gerakan. Aksi-aksi tersebut tidak hanya berisi penolakan terhadap kebijakan tunjangan, tetapi juga menyampaikan kritik yang lebih luas terhadap sistem politik yang dinilai semakin elitis dan tidak responsif terhadap aspirasi publik. Demonstrasi mahasiswa diwarnai dengan berbagai bentuk ekspresi, mulai dari orasi lantang, spanduk bernada satir, hingga bentrokan fisik dengan aparat keamanan. Gerakan ini menunjukkan bahwa mahasiswa tetap konsisten dalam perannya sebagai penjaga moralitas publik dan penggerak perubahan sosial. Sebagai aktor sosial yang kerap menjadi garda terdepan dalam menjaga integritas dan moralitas publik, aliansi mahasiswa dari berbagai perguruan tinggi di seluruh penjuru Indonesia menunjukkan respons yang cepat dan terorganisir terhadap dinamika politik yang mereka anggap menyimpang dari aspirasi rakyat. Mereka tidak memilih diam atau pasif, melainkan segera melakukan konsolidasi gerakan secara masif. Proses koordinasi ini berlangsung dengan efisien berkat pemanfaatan teknologi digital dan media sosial yang memungkinkan komunikasi lintas wilayah secara real-time dan efektif. Media digital telah menjadi instrumen strategis dalam mempercepat mobilisasi massa dan menyatukan berbagai elemen mahasiswa dalam satu gerakan kolektif yang solid.

Puncak dari konsolidasi tersebut terwujud dalam bentuk aksi demonstrasi serentak yang digelar secara nasional. Mahasiswa turun ke jalan, memenuhi halaman-halaman gedung DPRD di berbagai daerah, dan memusatkan kekuatan mereka di depan kompleks Gedung Parlemen di Senayan, Jakarta. Aksi ini bukan sekadar ekspresi kemarahan atau bentuk protes biasa, melainkan sebuah pernyataan politik yang tegas dan terstruktur. Mahasiswa secara sadar dan terencana menjalankan kembali fungsi kontrol sosial yang selama ini mereka emban sebagai bagian dari masyarakat sipil yang kritis. Mereka hadir untuk mengingatkan bahwa kekuasaan politik harus senantiasa tunduk pada prinsip-prinsip keadilan, transparansi, dan keberpihakan terhadap rakyat.

Karakteristik gerakan mahasiswa di era digital menunjukkan transformasi signifikan dibandingkan dengan pola-pola gerakan pada periode sebelumnya. Sebagaimana dikemukakan oleh Tilly (2004), dinamika gerakan sosial kontemporer sangat dipengaruhi oleh kemajuan teknologi komunikasi, yang telah merevolusi cara informasi disebarluaskan. Kecepatan dan jangkauan distribusi pesan-pesan politik menjadi jauh lebih masif,

memungkinkan mobilisasi opini publik dalam skala yang belum pernah terjadi sebelumnya. Dalam konteks aksi mahasiswa tahun 2025, terlihat jelas bagaimana generasi muda memanfaatkan digital untuk membangun solidaritas dan memperluas pengaruh gerakan mereka. Penggunaan meme politik, infografis edukatif, hingga siaran langsung demonstrasi melalui platform media sosial menjadi strategi baru dalam membentuk ruang perlawanan virtual. Praktik ini tidak hanya berfungsi sebagai alat komunikasi, tetapi juga sebagai mekanisme pembentukan identitas kolektif dan penguatan narasi gerakan.

Merujuk pada kerangka teori *political opportunity structure* yang dikembangkan oleh McAdam, Tarrow, dan Tilly (2001), keberhasilan suatu gerakan sosial sangat bergantung pada sejauh mana struktur peluang politik dapat diakses dan dimanfaatkan oleh aktor gerakan. Dalam hal ini, media sosial berperan sebagai katalisator yang memperluas ruang peluang tersebut. Platform digital memungkinkan mahasiswa untuk menjangkau audiens yang lebih luas, membentuk tekanan simbolik terhadap institusi seperti DPR, dan mengartikulasikan tuntutan mereka melalui kanal-kanal opini publik yang bersifat horizontal dan partisipatif. Fenomena ini mencerminkan adanya pergeseran paradigma dalam strategi gerakan mahasiswa, dari pendekatan konvensional yang mengandalkan mobilisasi fisik di ruang publik, menuju model mobilisasi hibrid yang menggabungkan aksi offline dan online secara simultan. Strategi ini tidak hanya meningkatkan efisiensi komunikasi dan koordinasi, tetapi juga memperkuat daya resonansi gerakan di tengah masyarakat digital yang semakin terhubung.

Fenomena ini menjadi menarik untuk dikaji lebih dalam karena mencerminkan evolusi gerakan mahasiswa dalam lanskap demokrasi kontemporer Indonesia. Jika pada era Reformasi 1998 fokus utama gerakan mahasiswa adalah pembenahan sistem politik dan penghapusan otoritarianisme, maka pada tahun 2025 isu yang diangkat lebih menitikberatkan pada aspek moralitas dan keadilan sosial dalam pengelolaan anggaran negara.

Dalam perspektif administrasi negara, aksi mahasiswa tahun 2025 ini dapat ditafsirkan sebagai manifestasi dari tuntutan terhadap penerapan prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik, atau yang dikenal dengan istilah *good governance*. Konsep ini, sebagaimana dijelaskan oleh Nugroho (2011), mencakup sejumlah prinsip fundamental seperti akuntabilitas, transparansi, dan responsivitas. Ketiga prinsip tersebut menjadi

landasan normatif bagi penyelenggaraan pemerintahan yang demokratis dan berorientasi pada kepentingan publik. Dalam konteks ini, DPR sebagai lembaga legislatif yang mewakili suara rakyat seharusnya menjadi teladan dalam menjunjung tinggi prinsip-prinsip tersebut. Namun, kebijakan terkait kenaikan tunjangan justru memperlihatkan adanya deviasi dari nilai-nilai good governance, yang tercermin dalam semakin lebarnya jarak antara wakil rakyat dan konstituennya.

Kebijakan tunjangan yang kontroversial tersebut menimbulkan persepsi publik bahwa DPR tidak lagi menjalankan fungsi representasi secara substantif. Ketika masyarakat tengah menghadapi tekanan ekonomi, seperti tingginya harga kebutuhan pokok dan terbatasnya akses terhadap layanan publik, keputusan untuk menaikkan tunjangan anggota legislatif dianggap sebagai bentuk ketidakpekaan terhadap realitas sosial. Dalam kerangka good governance, tindakan semacam ini menunjukkan lemahnya akuntabilitas politik dan rendahnya responsivitas terhadap aspirasi masyarakat. Transparansi dalam proses pengambilan keputusan pun dipertanyakan, karena kebijakan tersebut dinilai minim partisipasi publik dan tidak melalui mekanisme konsultasi yang inklusif.

Gerakan mahasiswa yang muncul sebagai respons terhadap kebijakan tersebut tidak dapat dipandang semata sebagai bentuk ekspresi kemarahan atau protes spontan. Sebaliknya, aksi demonstrasi yang dilakukan secara terorganisir dan masif merupakan mekanisme informal yang berfungsi untuk menuntut penerapan prinsip-prinsip good governance dalam praktik politik nasional. Mahasiswa, sebagai bagian dari masyarakat sipil yang memiliki kesadaran kritis dan kapasitas intelektual, mengambil peran sebagai pengingat moral bagi para pengambil kebijakan. Mereka mengintervensi ruang publik untuk menegaskan bahwa kekuasaan politik harus senantiasa tunduk pada mandat rakyat dan dijalankan secara transparan serta bertanggung jawab.

Dalam perspektif administrasi negara, gerakan mahasiswa dapat dipahami bukan sekadar ekspresi politik atau luapan emosional generasi muda, melainkan sebagai salah satu instrumen pengawasan publik yang bersifat non formal. Administrasi negara modern menekankan pentingnya mekanisme akuntabilitas dan kontrol sosial agar penyelenggaraan pemerintahan tidak terjebak pada praktik penyalahgunaan wewenang atau pengabaian kepentingan masyarakat luas. Namun, ketika saluran formal seperti lembaga pengawas internal, audit eksternal, hingga mekanisme check and balance antar-lembaga negara tidak berjalan secara optimal, baik karena lemahnya kapasitas institusi, adanya intervensi politik,

maupun keterbatasan independensi, maka ruang itu sering kali diisi oleh masyarakat sipil, salah satunya melalui gerakan mahasiswa.

Gerakan mahasiswa juga memperlihatkan dimensi partisipasi masyarakat dalam administrasi negara. Walaupun tidak dilembagakan secara resmi, partisipasi tersebut memiliki makna strategis, karena mendorong pejabat publik untuk lebih responsif terhadap aspirasi masyarakat. Hal ini sejalan dengan pandangan bahwa administrasi negara tidak dapat dilepaskan dari lingkungan sosial-politik di mana ia beroperasi. Artinya, efektivitas administrasi tidak hanya ditentukan oleh prosedur birokratis, tetapi juga oleh sejauh mana pemerintah mampu mengakomodasi suara masyarakat dalam setiap proses kebijakan.

Selain itu, respon negara terhadap gerakan mahasiswa juga merupakan bagian penting dalam memahami dinamika demokrasi di Indonesia. Gerakan mahasiswa sejak masa Orde Lama, Orde Baru, hingga era Reformasi selalu menempati posisi strategis dalam mendorong perubahan sosial-politik. Hal ini disebabkan oleh karakteristik mahasiswa yang relatif independen, memiliki kapasitas intelektual, serta berada pada posisi moral yang kuat sebagai kelompok terdidik (Aspinall, 2005). Dalam praktiknya, terdapat dua pola utama yang sering muncul dalam respons negara terhadap gerakan mahasiswa.

Pertama adalah pendekatan represif, yang ditandai dengan penggunaan kekuatan aparat keamanan, regulasi yang membatasi kebebasan berpendapat, hingga praktik kriminalisasi terhadap aktivis mahasiswa. Pola ini tampak jelas pada masa Orde Baru ketika demonstrasi mahasiswa sering kali dibubarkan dengan kekerasan, bahkan tidak jarang berujung pada korban jiwa seperti dalam tragedi Semanggi I dan II (Hadiz, 1998). Praktik represif ini menunjukkan bahwa negara cenderung memandang gerakan mahasiswa sebagai ancaman terhadap stabilitas politik dan keamanan, bukan sebagai bagian dari ekspresi demokrasi.

Kedua adalah pendekatan akomodatif, di mana negara membuka ruang dialog, menerima aspirasi mahasiswa, dan menjadikan kritik mereka sebagai bahan pertimbangan dalam perumusan kebijakan. Pola ini lebih tampak pada era Reformasi, terutama ketika pemerintah berusaha memperkuat citra demokratis dengan melibatkan berbagai aktor masyarakat sipil, termasuk mahasiswa, dalam proses deliberasi publik (Mietzner, 2012). Misalnya, keterlibatan mahasiswa dalam advokasi kebijakan pendidikan, isu lingkungan, maupun gerakan antikorupsi yang sering kali mendapat respon melalui forum dialog atau pembentukan kebijakan baru. Kedua pola ini mencerminkan bagaimana negara

memposisikan diri dalam menghadapi tekanan dari masyarakat sipil, khususnya dari kelompok intelektual muda yang kerap menjadi motor penggerak perubahan sosial. Respon represif cenderung mengurangi legitimasi pemerintah di mata publik, sementara respon akomodatif dapat memperkuat konsolidasi demokrasi dengan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap institusi negara (Heryanto & Hadiz, 2005). Dengan demikian, studi mengenai pola respon negara terhadap gerakan mahasiswa tidak hanya penting untuk memahami relasi antara negara dan masyarakat sipil, tetapi juga krusial dalam menilai kualitas demokrasi di Indonesia.

Pasca runtuhnya masa Orde Baru, negara Indonesia menunjukkan sikap yang ambivalen terhadap demokrasi. Di satu sisi, pemerintah mengklaim telah berkomitmen terhadap prinsip-prinsip demokrasi, seperti kebebasan berekspresi dan hak untuk berkumpul. Namun di sisi lain, praktik di lapangan menunjukkan bahwa negara tidak segan menggunakan pendekatan koersif terhadap gerakan sosial yang dianggap mengganggu stabilitas politik atau mengancam kepentingan elit. Ambivalensi ini menciptakan ketegangan antara retorika demokratis dan tindakan represif, yang pada akhirnya menimbulkan keraguan terhadap konsistensi komitmen negara dalam menjamin hak-hak sipil warga negara.

Ambivalensi tampak paling nyata dalam penanganan kebebasan berekspresi dan berkumpul. Negara secara retorik mengafirmasi hak-hak sipil, tetapi pada momen-momen krusial memakai perangkat koersif, mulai dari penangkapan, kekerasan aparat saat unjuk rasa, hingga pemidanaan melalui instrumen hukum yang elastis. Gelombang protes terhadap UU Cipta Kerja (2020) menunjukkan pola ini: verifikasi independen mendokumentasikan puluhan insiden kekerasan polisi dan pembatasan jurnalis serta pembela HAM. Laporan tahunan hak asasi manusia juga menandai pola penggunaan kekuatan yang berlebihan dan kriminalisasi ekspresi damai.

Ambivalensi negara juga muncul dalam asimetri kebebasan sipil antar-wilayah dan isu. Di area konflik/ketegangan politik seperti Papua, laporan HAM rutin menyoroti pembatasan jurnalis, pemutusan internet pada momen kritis, serta kekerasan dan impunitas; sedangkan di wilayah lain, aksi-aksi protes buruh/mahasiswa ditertibkan atas nama stabilitas dan ketertiban umum. Akumulasi praktik ini menumbuhkan jarak antara “demokrasi prosedural” dan “demokrasi liberal” yang menjamin hak-hak minoritas dan oposisi.

Aksi penolakan terhadap kebijakan kenaikan tunjangan DPR pada tahun 2025 bukan sekadar protes fiskal: ia muncul sebagai ekspresi kumulatif ketidakpuasan sosial-ekonomi

dan persepsi ketimpangan politik. Mahasiswa dari berbagai daerah turun ke jalan menuntut agar legislator menunjukkan empati terhadap kondisi rakyat yang tertekan oleh inflasi, pengangguran, dan beban biaya hidup, sementara publik melihat kenaikan tunjangan sebagai simbol jarak dan elitisasi kekuasaan. Mobilisasi mahasiswa ini mendapat momentum cepat karena isu tunjangan berfungsi sebagai katalisator yang menyatukan isu-isu struktural yang lebih luas (ketidakadilan distribusi, korupsi, dan transparansi publik).

Konteks digital dan jejaring sosial juga penting: komunikasi daring mempercepat penyebaran narasi protes, memperkaya repertoar aksi, dan memfasilitasi koordinasi lintas-kota sehingga demonstrasi lebih mudah meluas. Namun, arus informasi juga menciptakan medan pertempuran simbolik, video tindakan aparat yang keras, atau bukti-bukti lain, mempercepat opini publik yang mengutuk atau mendukung tindakan tertentu. Literatur terkini tentang partisipasi politik pemuda di Indonesia menunjukkan bahwa generasi muda sangat terampil memanfaatkan media digital untuk memobilisasi dan membentuk identitas politik kolektif, sehingga protes yang dimulai di kampus-kampus dapat cepat mendapat dukungan masyarakat luas.

Fenomena ini menimbulkan pertanyaan mendasar mengenai sejauh mana pemerintah dan aparat penegak hukum benar-benar berkomitmen terhadap prinsip kebebasan berekspresi dan hak untuk menyampaikan pendapat di ruang publik. Kebebasan tersebut secara normatif dijamin oleh konstitusi, khususnya dalam UUD 1945 Pasal 28E ayat (3) yang menyebutkan bahwa setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat. Namun, praktik di lapangan sering kali menunjukkan ketidakselarasan antara prinsip normatif dengan realitas. Ketika mahasiswa, sebagai bagian dari masyarakat sipil, menjalankan fungsi kontrol sosial terhadap kebijakan publik, respons represif dari negara seperti intimidasi, kriminalisasi, hingga pembubaran paksa demonstrasi, justru menimbulkan kesan bahwa ruang demokrasi semakin menyempit.

Dengan demikian, evaluasi terhadap komitmen pemerintah terhadap kebebasan berekspresi bukan hanya penting dari sisi normatif-konstitusional, tetapi juga dari sisi keberlanjutan demokrasi itu sendiri. Demokrasi yang sehat menuntut adanya ruang deliberasi publik yang terbuka, di mana mahasiswa sebagai bagian dari masyarakat sipil dapat menyuarakan kritik dan alternatif solusi tanpa harus dihadapkan pada ancaman represif. Jika pemerintah terus mempertahankan pendekatan koersif, maka demokrasi Indonesia akan mengalami

kemunduran dan berisiko terjebak dalam pola otoritarianisme baru yang tersembunyi di balik prosedur demokratis semu.

Oleh karena itu, pembahasan ini dapat mengungkap bagaimana mahasiswa mengartikulasikan kritik sosial, membangun jaringan solidaritas, serta memengaruhi arah dan kualitas demokrasi di Indonesia pada era digital. Mahasiswa tidak hanya hadir sebagai kelompok penekan (*pressure group*) yang menyuarakan ketidakpuasan terhadap kebijakan pemerintah, tetapi juga sebagai agen perubahan yang mampu menawarkan alternatif narasi atas situasi sosial-politik yang sedang berlangsung. Di tengah derasnya arus informasi, mereka menjadikan media sosial dan ruang digital sebagai arena baru untuk memperluas jangkauan kritik, menggalang opini publik, serta memperkuat posisi gerakan agar tidak terisolasi dalam lingkup kampus semata.

Fenomena ini juga memperlihatkan bagaimana generasi muda Indonesia, khususnya mahasiswa, berperan dalam meredefinisi praktik demokrasi di era digital. Mereka menghadirkan wajah baru gerakan sosial yang lebih cair, adaptif, dan mampu menghubungkan isu-isu lokal dengan percakapan global. Dalam konteks ini, kajian tentang peran mahasiswa menjadi penting bukan hanya untuk memahami dinamika politik kontemporer, melainkan juga untuk memprediksi arah perkembangan demokrasi Indonesia ke depan, terutama dalam menghadapi tantangan seperti polarisasi politik, komersialisasi media, hingga potensi disinformasi yang mengancam kualitas deliberasi publik.

Referensi:

- Aspinall, E., & Mietzner, M. (2019). Indonesia: The irony of stability. *Journal of Democracy*, 30(4), 5–19.
- Etzioni, A. (1975). *Comparative analysis of complex organizations*, rev. Simon and Schuster.
- Jurnal: Hadiz, V. R. (1998). Reformasi total? labor after suharto. *Indonesia*, (66), 109-125.
- Nugroho, R. (2011). *Kebijakan Publik di Indonesia: Teori dan Praktik*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Sherlock, S. (2010). The parliament in Indonesia's decade of democracy: People's forum or chamber of cronies?. *Problems of democratisation in Indonesia: Elections, institutions and society*, 160-178.
- Snow, D. A., Soule, S. A., & Kriesi, H. (Eds.). (2004). *The Blackwell Companion to Social Movements*. Blackwell Publishing.
- Suharto, E. (2015). Analisis kebijakan publik: panduan praktis mengkaji masalah dan kebijakan sosial.
- Tarrow, S. G., & Tilly, C. (2001). *Dynamics of Contention*. *Cambridge Studies in Contentious Politics*. Cambridge University Press.
- Tilly, C. (2004). *Social Movements, 1768–2004*. Boulder: Paradigm Publishers.